

hewan membuat kultur tanah menjadi bagus dan hasil yang di peroleh dari tanamannya melimpah.

1.6.4 Kesejahteraan

Kesejahteraan dilihat dari orang yang sudah kaya bisa dijadikan tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan. Kebahagiaan, status ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat merupakan indikator kesejahteraan. (Segel dan Bruzy, 1998 hlm:8). Kesejahteraan diwujudkan agar warga masyarakat tersebut dapat merasakan hidup dengan layak dan mampu untuk mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik, jika masyarakat sejahtera maka dari itu masyarakat tersebut mengalami suatu kemakmuran.

Kesejahteraan adalah cara hidup dan sarana dukungan sosial. Rumah tangga dan masyarakat secara fisik dan intelektual, diikuti dengan rasa aman, tantangan, dan ketenangan pikiran, yang memungkinkan setiap warga negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebesar-besarnya bagi dirinya, rumah tangganya, dan masyarakat. menjaga hak asasi manusia (Liony, dkk, 2013)

Dari kutipan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan ialah dimana suatu daerah, kelompok dan individual sudah dapat di ukur dari keadaan ekonomi yang mempuni serta rasa keselamatan dan ketentraman yang di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2. Tinjauan Teoritis

2.1 kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata bahasa Inggris "empowerment", yang berarti "kekuatan". Atau, mungkin dibaca sebagai pemberian atau peningkatan "kekuatan" (kekuasaan) kepada mereka yang masih lemah atau tidak beruntung. Upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok melalui suatu kegiatan untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, meningkatkan bakat, atau potensi yang mendukungnya dalam rangka membangun kemandirian dan keberdayaan dalam masyarakat yang layak, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan kepada membantu memecahkan masalah.

Secara harfiah, Soetomo (2011 hlm:21) menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang kurang beruntung atau juga disebut lemah. Istilah dari pemberdayaan semakin terkenal dalam konteks pembangunan dan pengentasan dalam memecahkan suatu kemiskinan (Anwas, 2016 hlm:48) Namun, hal yang lebih penting yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang mengakui isu-isu yang harus ditangani dalam kehidupan sehari-hari dan juga bertanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat itu sendiri sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala permasalahan atau permasalahan yang ada. (Aritonang, 2001 hlm:1).

Menurut Wrihantolo dan Dwidjowijoto (2007 hlm:2) bahwasannya pemberdayaan ialah suatu proses menjadi akan tetapi bukan suatu proses yang instan begitu saja, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai

tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Aspek tahapan tersebut mengarahkan kepada suatu kekuasaan atau penguasaan yang tidak terpaku dan terisolasi. Dalam kerangka hubungan sosial manusia, kekuasaan selalu hadir. Pemberdayaan sebagai proses transformasi, yang dengan demikian memiliki gagasan yang bermakna, merupakan kerangka dari konsepsi kekuasaan di atas. Potensi suatu proses bergantung pada dua faktor: pertama, kekuatan dapat diubah; kedua, jika kekuasaan tidak dapat diubah, pemberdayaan tidak mungkin dilakukan. Kedua, kekuatan itu memiliki potensi untuk berkembang. Menurut Suharto (2010 hlm:57-58). Dalam konsep ini ditekankan kepada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Selain menunjukan kepada potensi atau juga di sebut kemampuan, Suharto (2005 hlm:60) menyebutkan seseorang atas kekuasaanya, khususnya masyarakat rentan dan lemah, pemberdayaan juga memiliki kemampuan dalam beberapa aspek yang berpengaruh terhadap semua kalangan masyarakat diantaranya: (a) harus memenuhi suatu kebutuhan yang berdasarkan mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti ini bukan bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari suatu kondisi yang dimana masyarakat mengalami kelaparan, bebas dari kondisi kebodohan, bebas dari kondisi sakit, (b) menjangkau suatu sumber-sumber yang lebih produktif lagi yang memungkinkan kepada mereka dapat meningkatkan sumber pendapatan, memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan atau juga butuhkan, dan (c) Keterlibatan mereka dalam proses pembangunan dan keputusan yang berdampak pada mereka diperlukan. Beberapa profesional yang tercantum di bawah ini menyajikan pengetahuan pemberdayaan berdasarkan tujuan, proses, dan metode pemberdayaan.:

1. Pemberdayaan yang bertujuan kepada suatu peningkatan dalam proses penguasaan atau juga berkuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, sehingga masyarakat dikalangan bawah akan terasa lebih memiliki hidupnya yang layak.

2. Pemberdayaan adalah suatu proses dimana individu memiliki kemampuan untuk berbagi kendali dan mempengaruhi suatu kejadian yang disertai dengan institusi yang berdampak pada kehidupannya. Orang yang diberdayakan adalah mereka yang telah memperoleh keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan kekuatan yang diperlukan untuk mengubah kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Tujuan pemberdayaan adalah untuk mendistribusikan kembali kekuasaan melalui transformasi yang terorganisir secara sosial.
3. Orang, organisasi, dan masyarakat dapat dibimbing untuk dapat mengontrol (memerintah) hidupnya melalui pemberdayaan.

Kemudian Suharto (2010 hlm: 60) menyebutkan bahwa eksistensi pemberdayaan masyarakat didasari dengan strategi untuk perubahan status sosial secara terstruktur atau juga terencana yang merujuk kepada suatu pemecahan permasalahan sosial atau juga yang memenuhi suatu kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam hal ini suatu proses pemberdayaan, masyarakat mendapatkan suatu pembelajaran agar mampu secara mandiri dalam melakukan upaya-upaya yang harus perbaiki dalam segi kualitas maupun segi kuantitas kehidupannya. Dengan demikian suatu proses tersebut yang harus dilaksanakan ialah dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakatnya secara bertahap, terus-menerus, dan juga berkelanjutan.

Sedangkan menurut Kartasmita (2018 hlm: 144) keberdayaan dalam suatu masyarakat ialah dengan kemampuan dan potensi seseorang (individu) yang bersenyawa dengan suatu kehidupan masyarakatnya. Suatu masyarakat yang sebagian anggotanya sehat dari fisik maupun mental, kuat tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi dan terdidik. Sedangkan menurut Mulyawan (2016 hlm: 65) proses penggerak atau motivasi, keterampilan yang esensial dalam melaksanakan pekerjaan mandiri dengan mengambil keputusan dari kelompok masyarakat berdasarkan sumber daya individu, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran, dan

pengalaman sosial, yang bertujuan dalam bentuk upaya peningkatan suatu tingkat gengsi dan harkat dalam masyarakat yang dalam keadaannya saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jebakan dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan sehingga generasi penerus dapat lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari kutipan diatas mengenai pemberdayaan masyarakat ialah dimana memberikan suatu motivasi atau dorong kepada masyarakat dalam memberdayakan keterampilan, pengetahuan, penguatan kemampuan dalam diri masyarakatnya dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sekitar supaya bisa di gunakan sebaiknya mungkin. Upaya ini untuk menguatkan kemandirian masyarakat yang baik itu dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya untuk bisa memecahkan permasalahan yang di hadapi masyarakat tersebut.

Pemberdayaan itu sendiri sangat populer dalam kontek pembangunan dan pengentasan kemiskinan, namun yang terpenting adalah proses menyadarkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam sekitar. Hal ini pemberdayaan bertujuan untuk menyadarkan masyarakat supaya bisa berubah secara mandiri dalam kehidupannya dan mampu meningkat harkat bertabat masyarakat.

2.1.2 Tujuan pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah memusatkan perhatian pada kapasitas atau potensi masyarakat untuk mendukung sekelompok orang yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat menemukan kekuatan atau kemampuan dalam diri mereka sendiri untuk memenuhi kerinduan mendasar akan kebebasan (dalam arti mampu mengekspresikan diri). . Kebebasan berpikir, kebebasan dari kelaparan, kebebasan dari kebodohan, dan kebebasan dari penderitaan adalah contoh dari kebebasan. Mereka dapat mengakses sumber daya produktif yang akan membantu mereka meningkatkan pendapatan dan menerima barang dan jasa yang mereka butuhkan. Partisipasi dalam proses pembangunan, serta keputusan yang

berpotensi memengaruhinya. Beberapa profesional yang tercantum di bawah ini mendefinisikan pemberdayaan dalam hal tujuan, proses dan cara pemberdayaan (Suharto, 1997 hlm: 210-224)

1. Pemberdayaan berusaha untuk memberi individu yang lemah atau tidak beruntung dalam hidup lebih otoritas.
2. Pemberdayaan adalah proses dimana individu memperoleh kemampuan untuk terlibat di dalamnya, mengendalikan mereka, dan mempengaruhi peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. Upaya atau realokasi kontrol atau kekuasaan melalui perubahan struktur sosial disebut sebagai pemberdayaan.
4. Pemberdayaan adalah cara membimbing orang, organisasi, dan masyarakat agar mampu mengelola atau mempengaruhi kehidupannya. (Rappaport, 1984)

Menurut K. Suhendra (2006 hlm: 86) maksud dari tujuan pemberdayaan masyarakat dengan ditandainya ciri khas demokratis, kesetaraan masyarakat dengan pemerintah, kebebasan berbicara atau juga bebas dalam mengemukakan pendapat, kebebasan melakukan aktifitas, hak untuk merencana sesuatu, hak untuk mengelola aset yang ada dimasyarakat, Gerakan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menangani hak untuk memantau berfungsinya roda pemerintahan dan hak untuk menuai hasil dari pertumbuhan yang diperoleh dengan susah payah..

Menurut Mardikanto (2014 hlm: 202) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat.

1. Perbaikan kelembagaan (better institution)
dengan memperbaiki suatu kegiatan atau juga tindakan yang dilakukan, diharapkan akan menjadi lebih baiki dalam suatu kelembagaan, termasuk juga dalam pengembangan jejaringan suatu kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (better business)

Perbaikan di bidang pendidikan, aksesibilitas, kegiatan, dan reformasi kelembagaan diharapkan dapat memperkuat bisnis yang dapat dijalankan.

3. Perbaikan pendapatan (better income)

Dengan membaiknya usaha tersebut, diharapkan pendapatan yang diperoleh, serta pendapatan keluarga dan masyarakat akan meningkat.

4. Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan terhadap kondisi dimana pendapatan diharapkan dapat memperbaiki suatu lingkungan, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh suatu kondisi kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (better living)

Tingkat pendapatan dan keadaan suatu lingkungan yang akan berubah menjadi lebih baik, karena diharapkan dapat memperbaiki suatu kondisi keadaan dari setiap kehidupan keluarga atau juga masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (better community)

Kehidupan yang lebih baik adanya suatu dukungan oleh kondisi lingkungan (fisik dan social) yang lebih baik, diharapkan juga akan menjadi terwujudnya suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sedang menurut Edi Suharto (2005 hlm: 60) tujuan pokok dari pemberdayaan ialah diperperkuat dengan kekuasaan masyarakat, khususnya pada kondisi kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misal dari persepsi mereka itu sendiri atau juga yang diperbuat oleh mereka), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh kondisi struktur sosial yang tidak merata atau tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya sebagai berikut:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah gender, lemah pada kelas, dan maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti anak-anak, remaja, manula, penyandang cacat, gay dan lesbian dan masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yaitu kelompok dimana mengalami permasalahan pribadi dan keluarga.

Pelaksanaan dalam proses dan pencapaian suatu tujuan dalam pemberdayaan di atas dapat dicapai melalui beberapa penerapan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu : pemungkin, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan (Suharto, 1997 hlm: 218-219) dalam edi Suharto, 2005 hlm 67-68)

1. Pemungkinan adalah untuk membangun, atau apa yang kadang-kadang dikenal sebagai menciptakan, lingkungan atau iklim yang memungkinkan potensi komunitas untuk direalisasikan sepenuhnya sehingga dapat berkembang. Untuk dapat membebaskan masyarakat dari keterbatasan kultural dan struktural, pemberdayaan ini sangat diperlukan.
2. Penguatan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah dan memenuhi harapan. Pemberdayaan harus dapat membantu orang memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk mandiri dan percaya diri.
3. Perlindungan berarti melindungi seluruh komunitas, khususnya yang rentan, dari penindasan oleh yang berkuasa. Untuk menghindari perebutan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, pemberdayaan harus diarahkan atau diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak adil. Kelompok kecil atau rentan akan diuntungkan.
4. Penyokongan didefinisikan sebagai pemberian arahan dan bantuan kepada individu yang cakap dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam kehidupan.

Pemberdayaan diperlukan untuk menghindari menjadi lebih lemah dan lebih dirugikan.

5. Pemeliharaan adalah memelihara dimana suatu kondisi yang kondusif agar tetap terjadi kesinambungan dalam distribusi suatu kekuasaan agar antar berbagai kelompok dengan kelompok yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan diharuskan mampu untuk menjamin keselarasan dan keseimbangan untuk memungkinkan bagi setiap orang dapat memperoleh sebuah kesempatan untuk berusaha.

2.1.3 Indikator Keberhasilan pemberdayaan

Menurut Parson (dalam Suharto, 2010 hlm:63) berpendapat bahwa dalam pemberdayaan yang berkaitan dengan, ada tiga aspek. Suatu proses perkembangan yang dimulai dari pertumbuhan individu dan berkembang menjadi suatu perubahan sosial yang besar. Kondisi psikologis yang ditandai dengan keyakinan diri akan bermanfaat dan mampu mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Pembebasan merupakan konsekuensi dari gerakan sosial, yang dimulai dengan Politisasi kaum lemah dalam pendidikan akan memerlukan usaha kelompok kaum lemah untuk memperoleh kekuasaan dan memodifikasi struktur yang masih dalam tekanan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur suatu keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Analisis dinamis mengacu pada lima aspek yang terhubung satu sama lain secara sinergis, saling memperkuat, dan saling melengkapi. Berikut adalah tampilan yang lebih mendalam pada setiap dimensi.:

1. Kesejahteraan masyarakat yang dapat diamati atau diukur dari kecukupan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, uang, pendidikan, dan kesehatan disebut kesejahteraan dalam dimensi ini.

2. Dalam dimensi ini, akses mengacu pada kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya sebagai fungsi dari ketersediaan sumber daya. Hambatan untuk peningkatan kesejahteraan termasuk kurangnya akses ke sumber daya. Tidak adanya pemerataan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat kelas atas dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah, yang berkuasa dan terkontrol, pusat dan pinggiran, menyebabkan ketidakseimbangan dalam dimensi ini. Tenaga kerja, tanah, kredit, pengetahuan, keterampilan, waktu, dan sebagainya adalah contoh sumber daya.
3. Kemampuan untuk bersikap kritis. Kesenjangan dalam kehidupan sosial bersifat struktural sebagai akibat dari diskriminasi yang terlembagakan, bukan suatu tatanan alam, seperti kontinuitas sejak kapan pun atau semata-mata telah dikehendaki oleh Tuhan. Pemberdayaan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut memerlukan transformasi sosial.
4. Partisipasi. Dalam dimensi ini keberdayaan dalam dimensi ini masyarakat harus ikut andil dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Yang artinya, masyarakat ikut serta dalam proses sebuah pengambilan keputusan demi sebuah kepentingan bersama supaya mereka tidak lagi terabaikan.
5. Kontrol, Pemberdayaan dalam pengertian ini berarti bahwa orang-orang di semua lapisan masyarakat harus dapat terlibat dan mengontrol sumber daya yang tersedia untuk mereka. Artinya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, semua kelompok masyarakat, tidak hanya memilih orang-orang berkuasa yang dapat mengambil manfaat dari sumber daya, tetapi semua kalangan masyarakat secara keseluruhan, dapat melengkapi atau melengkapi hak-hak mereka, menjamin bahwa semuanya adil dan tidak ada yang bersaing dengan mereka yang berkuasa. Masyarakat juga

dapat mengelola dan mengontrol sumber daya mereka untuk memastikan bahwa mereka terus memenuhi kebutuhan mereka.

Indikator dalam keberhasilan yang dipakai dari tolak ukur suatu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah penduduk yang tergolong dalam kondisi kemiskinan.
2. Berkembangnya suatu usaha dalam upaya meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh kalangan penduduk miskin dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan perlunya peningkatan kesejahteraan keluarga kurang mampu di lingkungan tempat tinggalnya.
4. Semakin besar modal kelompok, semakin bersih sistem administrasi kelompok, dan semakin luas kontak kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat maka semakin mandiri komunitas atau kelompok tersebut.
5. Meningkatnya kemampuan distribusi pendapatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga berpendapatan rendah yang mampu memenuhi tuntutan sosial yang mendasar. (Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).

2.1.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses keberhasilan dalam upaya mengatasi suatu kemiskinan dan meningkatkan suatu kesejahteraan yang terbuka, agar masyarakat percaya diri dalam bersosial, harus memiliki jiwa kewibawaan yang setara dengan yang lain, tidak terhindar dari kalangan masyarakat yang lainnya. Dengan berpegangan pada prinsip pemberdayaan itu sendiri, program yang di ajurkan oleh pemerintah daerah akan seutuhnya berjalan.

Penulis mengutarakan bahwa terdapat empat prinsip yang sering kali digunakan untuk suksesnya suatu program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati, Asmana, dan Suryadiputra, 2005) Adapun untuk lebih jelasnya ialah sebagai berikut:

1. Prinsip kesetaraan merupakan suatu nilai yang harus ditekankan atau diperhatikan dalam melakukan suatu proses pemberdayaan masyarakat, dengan adanya kesetaraan atau sebagaimana diketahui juga kedudukan yang setara antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat, baik wanita dan pria. Kaitan antara kesetaraan harus dikembangkan melalui penyediaan kerangka kerja untuk bertukar informasi, pengalaman, dan keterampilan satu sama lain. Mengenali bakat dan keterbatasan masing-masing sehingga proses belajar timbal balik dapat berlangsung adalah salah satunya.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dapat membantu masyarakat menjadi mandiri adalah proses partisipatif dimana masyarakat merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program. Namun, untuk mencapai posisi tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan dengan fasilitator yang bersemangat dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Pengertian kemandirian, sering dikenal sebagai kemandirian, adalah untuk menghormati dan menghargai uang untuk meningkatkan kemampuan komunitas dalam merespon bantuan dari luar. Pendekatan ini tidak melihat individu unggul dari kelas bawah sebagai objek yang kurang memiliki potensi untuk berkembang (the have not), melainkan sebagai subjek yang kurang memiliki kemampuan untuk berkembang (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang batasan-batasan bisnis yang harus diselesaikan, sadar akan keadaan di sekitar mereka, memiliki

tenaga kerja dan keinginan untuk maju dalam hidupnya, dan terbiasa dengan konvensi masyarakat yang sudah berlangsung lama. . Semua ini harus digali dan dimanfaatkan sebagai sumber modal dasar bagi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Bantuan materi dari orang lain harus dilihat sebagai sumber dukungan, bukan sumber kelemahan, agar derajat kemandirian tetap terjaga.

4. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang sedemikian rupa untuk program berjangka panjang, pada dasarnya awal peran sebagai pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan-lahan tapi pasti, peran pendamping akan semakin berkurang karena kemampuan untuk masyarakat akan terasa apabila pemberdayaan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan, bahkan akhirnya akan terhapus dengan tersendirinya, karena masyarakat sudah mampu mengelola dan mengurus sedemikian rupa dalam proses kegiatannya sendiri.

Ada beberapa prinsip pemberdayaan menurut persepektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah suatu proses yang kolaboratif, dimana pekerja sosial dan masyarakat diharuskan bekerja sama partnernya. di antaranya sebagai berikut:

1. Proses dalam pekerjaan sosial merupakan suatu menempatkan masyarakat sebagai aktor maupun subyek yang kompeten yang mampu untuk menjangkau sumber dan kesempatan yang ada..
2. Masyarakat harus bercermin dirinya karena sebagai agen yang paling penting dalam mempengaruhi suatu perubahan.
3. Kompetensi yang diperoleh harus dipertajam melalui berbagai pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan persamaan kemampuan pada masyarakat itu sendiri.
4. Solusi yang berasal dari situasi yang telah terjadi yang diakibatkan dari kasus itu sendiri, menghargai suatu keberagaman yang berasal dari

sebuah faktor yang berada pada situasi di mana masalah tersebut itu muncul.

5. Jejaring sosial informal adalah sumber dukungan yang penting bagi orang-orang yang mengalami penurunan; upaya ini mengembangkan kompetensi dan kapasitas untuk mengatur orang lain.
6. Masyarakat diharuskan untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau pelaksanaan pemberdayaan yang diadakan untuk mencapainya tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
7. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan pokok utama dari pemberdayaan, dikarenakan pengetahuan mampu untuk dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Pemberdayaan melibatkan berbagai akses ke sumber daya dan kapasitas untuk menggunakannya secara efektif dan efisien adalah dua aspek pemberdayaan.
9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah secara berkelanjutan, evolutif dan masalah yang timbul selalu memiliki berbagai solusi karena adanya berbagai pandangan masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut.
10. Pemberdayaan dapat dicapai melalui struktur personal, pembangunan ekonomi secara bersambungan atau juga disebut paralel. (Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 1999).

Kesimpulan pendapat dari pakar sosial, di antaranya Swift dan Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981,1984), Solomon (1976), Dubois dan Miley (1992) yang dikutip oleh (Fahrudin, 2009:18) terdapat beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain:

1. pemberdayaan adalah suatu kolaborasi antara pemberdaya dan pekerja sosial saling membantu dalam upaya menggapai tujuan yang sudah ditentukan.

2. Proses pemberdayaan membayangkan sebuah sistem di mana pelanggan adalah pemain kunci yang dapat memasok sumber daya dan kemungkinan.
3. Kemampuan yang dimiliki didapatkan dari pengalaman yang sudah terjadi.
4. Pemecahan suatu masalah pada kondisi dimana masalah merupakan kompleksitas dari faktor yang dapat mempengaruhi.
5. Jaringan sosial informasi merupakan sumber dukungan penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi dan pengendalian diri dan tekanan untuk melakukannya.
6. Seseorang diharuskan berpartisipasi dalam upaya proses pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
7. Tingkatan kesadaran pengetahuan mengenai suatu kegiatan untuk merubah merupakan permasalahan yang paling utama dalam pemberdayaan
8. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien.
9. Karena suatu masalah selalu memiliki beberapa solusi, maka proses pemberdayaan merupakan proses yang dinamis dan sinergis yang terus berubah dan berkembang. Layanan pribadi dan pertumbuhan sosial ekonomi adalah dua cara untuk mencapai pemberdayaan.

2.1.5 Strategi dan proses pemberdayaan

Menurut Gunawan (1996 hlm: 100) secara fakta berbagai konsep maupun program pemberdayaan masyarakat Pamokolan Kec. Cihaurbeuti untuk mengurangi tingkatan kondisi kemiskinan, dan keterbelakangan sumber daya manusia telah banyak dilaksanakan anggota pemerintah desa setempat yang sebelumnya dan sekarang sedang melakukan prosem pemberdayaan tersebut. Diantaranya ada program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan diartikan sebagai program pembangunan

sektoral, pembangunan daerah, dan pembangunan khusus. Proyek-proyek ini dilaksanakan secara top-down, terpusat yang mengabaikan kapasitas masyarakat untuk terlibat secara aktif. Birokrasi dan campur tangan pemerintah memainkan peran besar dalam pelaksanaannya, yang dapat memiliki pengaruh yang merugikan pada kepentingan jangka pendek. Pemerintah terdorong untuk memfokuskan kembali pembangunan dan “merevitalisasi” pengertian pembangunan sebagai akibat dari munculnya realitas buruk di masyarakat.

Safi'i, (2011 hlm: 17) Bahwa adanya berbagai rekomendasi yang dikemukakan, kebutuhan untuk membangun lingkungan kebijakan ekonomi makro yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, mengadaptasi kebijakan sektoral, meningkatkan efisiensi dan sensitivitas pasar, dan menghilangkan regulasi birokrasi dan campur tangan pemerintah dalam interaksi ekonomi. Selain itu, Soetomo (2011 hlm: 25) menjelaskan bahwa diperlukan pergeseran pola pikir dari sentralisasi ke desain netralisasi, pola pembangunan yang didasarkan pada konsep perencanaan top-down ke perencanaan bottom-up, keseragaman ke variasi lokal, sistem komando sebagai proses pembelajaran, dan ketergantungan. untuk keberlanjutan, pengucilan sosial untuk inklusi, dan peningkatan transformasi.

Reorientasi pembangunan, gerakan sosial, institusi lokal, dan peningkatan kapasitas semuanya diperlukan untuk mewujudkan gagasan ini. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemungkinan tambahan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sehingga setiap warga negara mampu dan berdaya. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya berani untuk mengembangkan sikap masyarakat melalui realisasi kekuatan potensi yang dimilikinya. (Kusnadi, 2006 hlm: 150). Faktanya pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk membangun sebuah perekonomian kerakyatan. Sementara itu, upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi perhatian sebagian kelompok masyarakat, harus menjadi langkah awal dalam pertumbuhan ekonomi rakyat.

Menurut Kusnadi (2006 hlm: 143) Kemiskinan masyarakat merupakan salah satu masalah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan baik oleh berbagai pihak pusat (pemerintah). Masalah pemberdayaan masyarakat masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat mengingat tren ini. Meski sulit mencapai hasil optimal dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun iklim otonomi daerah dan keterbukaan politik akan memberikan optimisme terhadap upaya pengembangan kemampuan pemberdayaan masyarakat.

Konsep dari *empowerment* (pemberdayaan), apabila ditelaah lagi lebih mendalam akan melahirkan dua muatan yang dasar terdiri dari asas positivisme dan asas interaktif (Riyadi, 2001 hlm: 26). Prinsip positivis didasarkan pada analisis kuantitatif, sebagai berikut: Pertama dan terutama, ada rencana pertumbuhan. Lebih diarahkan pada strategi pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menghitung Produk Nasional Bruto (PDB) dalam evaluasi kinerja pembangunan di suatu wilayah atau negara yang lebih luas dalam proses pelaksanaan pembangunan. Program kedua adalah program ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada analisis ketenagakerjaan. Teknik ketiga adalah strategi kebutuhan dasar, yang mengarah pada kebutuhan dasar masyarakat luas.

Lebih dititik beratkan pada perspektif dalam pembangunan secara interaktif dengan mengkaji secara kualitatif sebagai berikut: Pertama adalah pemberdayaan, yaitu mengkaji bagaimana meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kedua, ada keberlanjutan, yang dapat dipertimbangkan dalam konteks pembangunan dengan mempertimbangkan bagaimana melestarikan sumber daya alam di lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Ketiga, metode teknologi, yang melibatkan pembinaan pembangunan dengan memanfaatkan kemungkinan untuk memasukkan teknologi ke dalam proses pembangunan.

Salah satu faktor terpenting dalam menjamin keberhasilan proyek pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat. Seseorang yang

berpartisipasi dalam proses pembangunan harus berpartisipasi dalam proses pemberdayaan berkelanjutan ketika keterlibatan ini diperlukan. Lebih jauh, penyadaran masyarakat merupakan taktik yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan, karena dalam proses pemberdayaan memerlukan pemahaman masyarakat terhadap kepentingan peserta program pemberdayaan. Menurut Suharto (dalam Alfitri, 2011) dalam suatu proses pelaksanaan untuk pencapaian sebuah tujuan dalam pemberdayaan harus dilakukan dengan melalui pendekatan yang disingkat 5P yaitu sebagai berikut:

1. Pemungkinan adalah kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan komunitas atau kelompok berkembang secara maksimal. Akibatnya, pemberdayaan harus dilepaskan dalam segala hal yang dihambat oleh masyarakat.
2. Penguatan adalah suatu usaha untuk meningkatkan potensi atau daya (empowering) komunitas atau kelompok itu sendiri. Selain mengembangkan lingkungan dan suasana, diperlukan kegiatan positif lebih lanjut. Penguatan ini juga harus mencakup langkah-langkah nyata, seperti memberikan banyak masukan (input) dan membuka berbagai pintu untuk berbagai kemungkinan (opportunities) yang memberdayakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Inisiatif paling signifikan dalam rangka pemberdayaan ini adalah peningkatan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti uang, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. Dengan memberdayakan masyarakat, perlindungan harus mencakup pengamanan kelompok rentan dari penindasan oleh kelompok kuat. Sangat penting untuk menghindari yang lemah menjadi lebih lemah selama proses pemberdayaan, yang mengakibatkan hilangnya kekuatan dalam menghadapi yang kuat. Karena merupakan bagian dari prinsip pemberdayaan kolektif, maka perlindungan berarti berpihak pada yang rentan. Melindungi

tidak berarti mengasingkan atau melepaskan diri dari keterlibatan komunal, karena ini hanya akan membuat yang lemah mengerdilkan dan melemahkan yang kecil. (Mulyawan, 2016 hlm: 67).

4. Dukungan, yaitu pemberian bantuan atau dorongan kepada anggota masyarakat agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaya. Jadi, pemberdayaan harus dapat membantu dan menginspirasi masyarakat agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya tanpa merasa terasing atau terisolasi dari yang berkuasa.
5. Pemeliharaan merupakan suatu kondisi yang dilihat dari produktifitasnya kekondusifan agar tetap terjadi kesinambungan dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah dalam rencana pemberdayaan, oleh karena itu setiap orang mampu untuk memiliki sebuah kesempatan untuk berusaha. Istilah dari pemberdayaan itu sendiri dipakai untuk menggambarkan atau memperlihatkan seseorang individu yang diharapkan supaya bisa lebih maju dalam kehidupannya dengan cara memelihara suatu kondisi tersebut. Sehingga setiap aktivitas individu dapat mempunyai pengontrolan dalam berbagai semua aspek kehidupann sehari-hari yang bertujuan bentuk butki keberdayaannya.

Dengan demikian, aspek terpenting didalam suatu progam pemberdayaan masyarakat adalah progam yang disusun dengan semestinya yang dirancang oleh masyarakat itu sendirinya dengan diberikan didampingi oleh si pemberdaya dalam upaya untuk memperlancar suatu program yang di ikut oleh masyarakatnya dalam ikut serta atau partisipasi dalam program tersebut, supaya bisa menjawab semua kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan dibangun dari sumber daya yang ada, sangat sensitif terhadap nilai-nilai suatu budaya setempat, harus juga memperhatikan dampak lingkungan,

tidak menciptakan kebergantungan kepada orang lain atau si pemberdaya, berbagai pihak di haruskan itu andil dalm keterlibat dalam pemberdayaan tersebut supaya bisa berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat.

2.1.6 Pengelolaan

Pengelolaan dalam secara umum merupakan suatu kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik dan memiliki sebuah nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan diartikan juga sebagai sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencocokkan apa yang mendasari dari suatu kebutuhan tersebut supaya bisa bermanfaat. Nugroho (2003 hlm:119) menyatakan pendapatnya bahwa istilah "manajemen" sering digunakan dalam ilmu manajemen. Kata manajemen secara etimologis berhubungan dengan kata manage. (untuk mengelola) biasanya mengacu pada proses mengendalikan atau memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pada hakikatnya manajemen adalah ilmu yang mempelajari proses pengelolaan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Syamsu berfokus pada manajemen sebagai fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Perspektif Pamudji tentang manajemen tampaknya terfokus pada dua komponen utama, terutama manajemen sebagai pengembangan, yang melibatkan perubahan sesuatu agar segar dan berharga. Manajemen sebagai pembaharuan adalah upaya untuk menjaga sesuatu agar tetap berfungsi dengan baik sehingga dapat melayani kebutuhan dengan lebih baik.

Menurut Admosudirjo (2005 hlm:160) Manajemen didefinisikan sebagai pengendalian dan eksploitasi semua komponen sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Berdasarkan hal tersebut di atas, Admosudirjo menekankan manajemen sebagai proses pengaturan dan pemanfaatan semua komponen sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Moekijat (2000 hlm: 1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia sebagai sumber-sumber lain. Dengan hal itu, Moekijat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan Terry (2009 hlm: 9) mengklaim bahwa manajemen sama dengan pengelolaan, dan bahwa manajemen didefinisikan sebagai proses membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengelolaan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggabungkan ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen, atau yang biasa disebut dengan manajemen pada umumnya, pada umumnya terkait dengan tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengarahan, dan pengawasan di dalam suatu organisasi. Manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti menangani, memimpin, mengarahkan, atau mengendalikan. Menurut beberapa ahli, manajemen adalah proses, yang didefinisikan sebagai upaya metodis untuk menyelesaikan tugas. Proses ini terdiri dari serangkaian tindakan yang berurutan yang dilakukan secara terus menerus dan terhubung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.6.1 Perencanaan (Planning)

Istilah perencanaan berasal dari kata *plan*, yang dapat diterjemahkan sebagai desain atau kerangka kerja yang lengkap. Tujuan (apa yang ingin Anda capai), aktivitas (tindakan untuk mencapai tujuan), dan waktu semuanya dapat didefinisikan sebagai komponen penting berdasarkan konsep ini (kapan aktivitas akan dilakukan). Apapun yang direncanakan pasti akan terlaksana di masa depan. Akibatnya, suatu rencana dapat dipandang sebagai reaksi (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005 hlm :27)

Menurut G.R Terry, Dalam hal membayangkan dan menyusun tindakan yang diusulkan dan pemikiran yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta, serta mengembangkan dan menggunakan asumsi masa depan. (Purwanto,2006 hlm :45)

Menurut Tjokromidjojo dalam (Syafelevi, 2011 hlm:28) Dalam arti luas, perencanaan adalah persiapan metodis dari tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah strategi yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian: perumusan rencana dan pelaksanaan rencana. Karena esensi dari rencana adalah untuk mengarahkan pelaksanaan tindakan, dapat digunakan untuk mengatur dan menilai jalannya suatu kegiatan. (Listyansij,2014 hlm:90)

Menurut Terry dalam (Riyadi,2005 hlm:3) Dengan menguraikan dan membangun suatu tindakan yang perlu diperhatikan untuk mencapai efek yang diinginkan, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan data serta mengembangkan dan menerapkan asumsi tentang masa depan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwasannya perencanaan adalah suatu rangkaian yang dibuat dengan tujuan yang di analisis sesuai dengan kebutuhan yang mereka capai bersama dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

2.1.6.2 Pengorganisasian (Organizing)

Menurut George.R.Terry dalam buku “Prinsip-prinsip Manajemen” cetakan kesebelas (2012 hlm:17) Pengorganisasian adalah suatu langkah dalam proses pelaksanaan yang melibatkan pengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan-kegiatan pengorganisasian yang dimaksud meliputi :

- a. Pembagian tugas-tugas pekerjaan operasional.
- b. Mengelompokan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional
- c. Menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan
- d. Memilih dan menempatkan orang untuk dipekerjakan yang sesuai
- e. Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan
- f. Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota
- g. Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai
- h. Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan

Sentot Iman Wahjono (2008 hlm:9) organisasi adalah suatu proses mengalokasikan pekerja, pengaturan , wewenang, sumber daya kesejumlah anggota organisasi dan sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Sondang.P.Siagian (2003 hlm:27) organisasi adalah seluruh proses pengumpulan orang, alat, tugas, dan wewenang sedemikian rupa untuk membentuk organisasi yang dapat ditempatkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan yang dibuat sebelumnya dikenal sebagai organisasi.

Dengan pemikiran tersebut, satu pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai pembagian semua pekerjaan kepada setiap orang dalam suatu organisasi atau kelompok dengan membangun struktur organisasi atau bagan di mana tugas-tugas telah diberikan sesuai kesepakatan bersama, memastikan bahwa proses kerja berjalan lancar dan tujuan. bertemu. dilaksanakan dengan benar dan efisien.

2.1.6.3 Penggerakan (Actuating)

Penggerakan secara umum dititik beratkan sebagai menggerakkan orang lain atau juga pendorong orang supaya itu berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya. penggerakan adalah suatu kegiatan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Husein, 2003 hlm:78). Sedangkan pengertian dari penggerakan *actuating* menurut beberapa ahli mengemukakan sebagai berikut :

Actuating mengacu pada tanggung jawab manajer untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana untuk memenuhi tujuan kelompok atau organisasi. Mobilisasi adalah proses menempatkan apa yang dimaksudkan dalam rencana menjadi tindakan dengan menggunakan persiapan organisasi. (Wibowo. 2006 hlm:13)

Menurut Prof. Dr. Sondang, M. P. A. penggerakan adalah praktik mendorong bawahan untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. (Sondang, 2004 hlm:120)

Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa menggerakkan atau memotivasi adalah suatu tindakan untuk menumbuhkan suatu skenario dimana dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang dapat langsung diarahkan pada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Sudjana, 1992 hlm:115)

Dari pendapat para ahli diatas dapat titik beratkan bahwasannya, *Actuating* adalah suatu kegiatan yang menggerakkan orang dalam suatu organisasi atau kelompok untuk dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi sebuah *goal* dalam suatu organisasi. Pada hakikatnya, gerakan tidak dapat dipisahkan dari aspek kemanusiaan suatu organisasi. Sejauh mana manusia dapat diberdayakan dengan menggunakan semua aspek lain dan dapat melaksanakan tanggung jawab yang diberikan akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Unsur lainnya menyakut

kepada dana, sarana prasarana, alat, metode, waktu dan informasi. Unsur lainnya tidak akan berarti bagi organisasi ketika unsur manusiawi tidak memiliki semangat untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan itu suatu keberhasilan organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur manusiawi yang terlibat dalam organisasi itu sendiri.

2.1.6.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah pekerjaan manajemen yang paling penting, dan sangat terkait erat dengan tujuan organisasi sehingga menjadi hal yang mutlak dalam organisasi mana pun.. Seperti yang diungkapkan oleh Terry, bahwa untuk memenuhi tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar, maka harus dilakukan kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. (Terry, 2005 hlm:137)

Hal ini didukung oleh Situmorang dalam bukunya *Aspek Hukum Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, yang mengatakan bahwa Mekanisme pengawasan suatu organisasi, sebagai salah satu peran manajemen, sangat vital bagi tercapainya suatu program dari organisasi tersebut. Bolak-balik dari suatu organisasi tanpa pengawasan sangat timpang karena pengawasan sangat penting bagi suatu organisasi.. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang insentif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan suatu ke lambanan dalam mencapai suatu tujuan atau juga tidak akan tercapai kepada sasaran dan tujuan yang akan telah ditentukan|. (Situmorang, 2005 hlm:8)

Jadi pengawasan sangat penting karena menentukan apakah suatu organisasi atau birokrasi akan hidup atau mati dengan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, instruksi, tujuan, dan kebijakan untuk memenuhi tujuan yang ditentukan. Segala upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan untuk

memutuskan apakah itu sejalan dengan apa yang harus dilakukan atau tidak. (Sujamto, 2007 hlm:53)

Manulang dalam karyanya mendefinisikan pengawasan ialah sebagai “suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula” (Manullang, 2005 hlm:4)

Pendapat tersebut diperkuat menurut Sondang P. Siagian Proses pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah pengawasan. (Siagian, 2004 hlm:135)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka itu Pengertian pengawasan menurut aslinya adalah suatu usaha untuk menjamin agar suatu proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Lebih spesifik lagi, pengawasan adalah upaya sistematis untuk menerapkan standar implementasi dengan tujuan merencanakan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan, menentukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya organisasi digunakan paling efisien dalam mencapai tujuan yang ditentukan. (Kaho, 1997 hlm:239)

2.1.7 Pupuk Organik

Menurut (Handiwito 2008 hlm: 32) Pupuk organik adalah bahan yang diberikan kepada tanah untuk mensuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Kesuburan tanah harus dijaga dan ditingkatkan dengan menambah dan mengisi kembali unsur hara buatan agar hasil tanaman tetap normal atau meningkat. Tujuan penyediaan unsur hara ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara unsur hara yang hilang karena pemanenan, erosi, dan bentuk pencucian lainnya.

Pemupukan adalah proses mengembalikan atau menambahkan unsur hara ke dalam tanah. Jenis pupuk yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga diperlukan teknik diagnostik yang akurat untuk memastikan bahwa unsur hara tambahan hanya dibutuhkan oleh tanaman dan yang kekurangan di dalam tanah. (Sugiyanta 2011 hlm).

pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral, dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011). Pupuk organik sisa tanaman (jerami, kompor, tongkol jagung, ampas tebu, sabut kelapa), serbuk gergaji, kotoran hewan, sampah media jamur organik, sampah pasar, sampah rumah tangga, dan limbah industri, serta pupuk hijau, semuanya dapat digunakan untuk membuat pupuk . Karena bahan dasar yang digunakan untuk membuat pupuk organik berbeda, maka kualitas pupuk yang dihasilkan juga bervariasi. Karena penggunaan pupuk organik dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka diperlukan undang-undang atau peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pupuk organik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan tanaman dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (<http://www.pustaka-deptan.go.id>, 2010).

Pupuk organik sangat penting untuk kesuburan tanah karena mencakup satu atau lebih komponen untuk menggantikan yang hilang oleh tanaman. Pemupukan, kemudian, adalah proses memberikan nutrisi ke tanah dan tanaman. Pupuk adalah zat yang dimasukkan ke dalam media tanam atau tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman agar dapat berproduksi dengan baik. (Dwicaksono,2013).

Pupuk organik merupakan hasil mikroorganisme pengurai (remodelling) sumber daya organik seperti tanaman kering (humus) dan

limbah kotoran ternak untuk memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pupuk organik berfungsi sebagai penyangga kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga memungkinkan efisiensi pemupukan dan produksi lahan meningkat. (Supartha, 2012). Komposisi kimia pupuk kandang bervariasi tergantung pada jenis ternak, umur ternak, jenis pakan, jumlah penyebaran, cara penanganan dan penyimpanan pupuk, yang berpengaruh positif terhadap sifat fisik dan kimia tanah, mendorong kehidupan mikroba tanah, dan perubahan berbagai faktor dalam tanah untuk menjamin kesuburan tanah. (Sajimin, 2011). Pupuk organik dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara makro bagi kebutuhan tanaman serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dengan meningkatkan anion utama bagi pertumbuhan tanaman seperti nitrat, fosfat, sulfat, borat, dan klorida, serta meningkatkan ketersediaan anion untuk pertumbuhan tanaman seperti nitrat, fosfat, sulfat, borat, dan klorida. (Lestari, 2015).

Menurut Hadisuswito dan Sukamto dalam Oktavia (2015) Pupuk organik dibedakan menjadi dua kelas berdasarkan bentuk dan strukturnya: pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Asam humat dan asam folat termasuk dalam pupuk organik, serta zat pengatur tumbuh yang membantu tanaman tumbuh lebih cepat. (Supartha, 2012). frekuensi pemberian pupuk dalam dosis yang berbeda, dan frekuensi yang tepat akan mempercepat laju pembentukan daun. Dengan adanya komponen organik yang dapat memperbaiki aspek fisik, kimia, dan biologi tanah, maka pupuk organik dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan pupuk buatan yang berlebihan. Melonggarkan tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, memperkuat ikatan partikel, meningkatkan kapasitas menahan air, mengurangi erosi dan longsor, dan meremajakan kapasitas pengolahan tanah adalah contoh perbaikan karakteristik fisik. (Kelik, 2010).

Pupuk organik dapat dibuat dari limbah sayuran baru, sisa sayuran basi, sisa nasi, limbah ikan, unggas, cangkang telur, dan limbah buah-buahan seperti anggur, kulit jeruk, apel, dan sebagainya semuanya dapat

digunakan untuk membuat pupuk organik. (Hadisuwito, 2007). Karena cepat terurai secara hayati dan berlimpah nutrisi yang dibutuhkan tanaman, bahan organik basah, seperti limbah buah dan sayuran, merupakan bahan sumber yang ideal untuk pupuk organik. Semakin tinggi kandungan bahan organik selulosa, semakin lama waktu hancur. (Purwendro dan Nurhidayat, 2006)

Pupuk organik memiliki sejumlah manfaat, antara lain mampu mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun, meningkatkan fotosintesis dan penyerapan nitrogen dari udara, meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, merangsang produksi cabang, pertumbuhan, meningkatkan pembentukan bunga dan akan berbuah, mengurangi gugur dan bunga menjadi buah, serta meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat. (Huda, 2013)

Sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan atau peraturan untuk tingkat kimia dan pH yang terkandung dalam pupuk organik saat pembuatannya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan standar teknis minimal pupuk organik sebagai berikut.

Tabel 2.1 Standar Kualitas Mutu Pupuk Organik

Parameter	Standar
Total N	<2 %
C organik	>4 %
Rasio C/N	15-25 %
P ₂ O ₅	<2 %
K ₂ O	<2 %
Ph	4-8

Sumber : (Peraturan Menteri Pertanian No.28/Permentan/OT.140/2/2009)

Perkembangan tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Nitrogen (N) merupakan unsur hara makro yang mendorong

perkembangan tanaman, sintesis asam amino dan protein, pertumbuhan vegetatif (warna daun hijau, panjang daun, lebar daun), dan pertumbuhan vegetatif batang (tinggi dan tinggi batang). (kloepper, 1993). Fosfat (P) adalah nutrisi yang membantu pergerakan energi dari metabolisme tanaman, serta pertumbuhan akar, pembentukan biji, pembelahan sel tanaman, perluasan jaringan sel, pembungaan, dan pembuahan. Kalium diperlukan untuk fotosintesis, transfer produk yang dicerna, enzim, dan mineral, termasuk air (K). Meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah dan menghasilkan senyawa kompleks yang mengandung ion logam berbahaya seperti aluminium, besi, dan mangan. Ini juga dapat meningkatkan ketahanan dan kekebalan penyakit tanaman. (kloepper, 1993).

Kalsium (Ca) memperkuat dinding sel, meningkatkan kekuatan tanaman dan daun, merangsang pertumbuhan akar, dan membantu pemanjangan sel, sintesis protein, dan pembelahan sel pada tanaman, selain unsur makro. (sutandi, 2004). Magnesium adalah komponen klorofil yang membantu fotosintesis dengan membentuk gula dan mengatur asupan makanan. Ini adalah pembawa fosfat, translocator karbohidrat, dan aktivator enzim termasuk transforilase, dehydrogenase, dan carboxylase pada tanaman. (leiwakabessy dan sutandi 2004)

Tanaman menyerap besi sebagai Fe^{2+} , Fe^{3+} , dan NaFeDTA. Pada tumbuhan, Fe mempertahankan klorofil dalam daun, merupakan komponen penting dari hemoglobin, dan sebagai protein ferredoxin, berperan dalam metabolisme termasuk fiksasi N_2 , fotosintesis, dan transpor elektron dalam koloplas tanaman. Mangan membantu dalam proses reduksi dan oksidasi, serta meningkatkan penyerapan cahaya, sintesis protein, dan berfungsi sebagai katalis dalam reaksi tanaman. (Amalia, 2011)

Rasio karbon (C) terhadap nitrogen (N) adalah rasio karbon (C) terhadap nitrogen (N) dalam suatu bahan. Rasio karbon-ke-nitrogen dapat digunakan sebagai indikator proses fermentasi; jika rasionya masih antara 20 dan 30%, pupuk fermentasi dapat digunakan. Perbedaan konsentrasi C dan N akan mengganggu kelangsungan proses, dan akibatnya kualitas pupuk cair yang dihasilkan akan menurun. (pancalaga,2011)

Jerami yang memiliki rasio C/N 50-70 persen merupakan contoh bahan organik segar dengan rasio C/N yang tinggi. Konsep utama di balik pembuatan pupuk adalah menurunkan rasio C/N bahan organik ke tingkat yang sama dengan rasio C/N tanah (20 persen). Proporsi energi mikroba terhadap nitrogen yang digunakan dalam sintesis protein dikenal sebagai rasio C/N. (Sundari dkk 2012).

2.1.8 Kesejahteraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, istilah sejahtera berasal dari kata sejahtera yang berarti “aman, tenteram, sejahtera, dan selamat” (terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan, dan sebagainya). Kata Sansekerta "catera" berarti payung, dan kata makmur mengandung konotasi itu. Dalam konteks kesejahteraan, orang yang sukses adalah orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga menjalani kehidupan yang aman dan menyenangkan baik secara fisik maupun emosional.

Dalam proses pertumbuhan, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan harus dicapai tidak hanya dalam materi, tetapi juga di alam spiritual. Ketika suatu proses pembangunan hanya terfokus pada menghasilkan keberhasilan moneter, tingkat kesejahteraan masyarakat yang diinginkan hampir dipastikan akan terlewatkan. Bahkan jika semua fasilitas dapat diakses, orang akan mengalami kehidupan yang hampa dan sia-sia.

Beberapa individu terus-menerus menyamakan kesejahteraan dengan gagasan kualitas hidup. Pengertian kualitas hidup adalah representasi dari keberadaan yang bahagia. Kualitas hidup didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandangan individu tentang keberadaannya di masyarakat dalam konteks budaya saat ini dan sistem nilai yang terhubung dengan tujuan, harapan, standar, dan masalah sehari-hari. Karena dipengaruhi oleh keadaan fisik, jiwa, jumlah kemandirian, dan kontak sosial individu dengan lingkungan, maka pengertian ini memiliki arti yang lebih luas.

Kesejahteraan adalah kumpulan kesenangan yang dicapai sebagai konsekuensi dari mengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Namun, derajat kesejahteraan itu relatif karena ditentukan oleh tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi uang tersebut. Menurut sunarti (2012), Kesejahteraan adalah cara hidup dan sistem sosial, material, dan spiritual yang menanamkan rasa aman, moralitas, dan kedamaian batin pada setiap orang, memungkinkan dia untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang sebesar mungkin untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat. publik.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan digambarkan sebagai suatu sistem keberadaan dan kehidupan sosial material dan spiritual yang dicirikan oleh rasa aman, kesusilaan, dan ketenangan lahir dan batin, yang memungkinkan setiap orang mencapai tingkat pemenuhan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. dengan berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kewajiban Pancasila.

Kesejahteraan digunakan dalam konteks negara untuk menunjukkan bahwa pemerintah menawarkan berbagai layanan sosial kepada penduduknya. Negara kesejahteraan dicirikan sebagai visi sosialis

demokratis yang lahir dari perjuangan rakyat kelas pekerja untuk masyarakat yang adil. Konsep negara kesejahteraan barat dianggap sebagai pergeseran sistem kapitalis menuju cita-cita sistem sosialis.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan social. Kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kemasyarakatan masyarakat agar dapat hidup layak dan berkembang dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan adalah kumpulan kesenangan yang dicapai sebagai konsekuensi dari mengkonsumsi pendapatan yang diperoleh. Namun, derajat sejahtera merupakan istilah yang relatif karena ditentukan oleh tingkat kepuasan yang diperoleh dari penggunaan pendapatan. Menurut sunarti (2012), Kesejahteraan adalah cara hidup dan sistem sosial, material, dan spiritual yang menanamkan rasa aman, moralitas, dan kedamaian batin pada setiap orang, memungkinkan dia untuk berusaha memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang sebesar mungkin untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat publik.

Menurut Dr.Ir. hidayat Syarief (1993) Dua dimensi yang menjadi tolak ukur kesejahteraan yaitu dari kesejahteraan material dan spiritual, dimana kesejahteraan material relative lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan dan papan, kebutuhan lainnya yang dapat diukur materi, secara umum pengukuran kesejahteraan dapat diukur dengan tingkat pendapatan keluarga.

Untuk menentukan suatu keluarga sudah digolongkan sejahtera secara material atau belum tentunya diperlukan "*cut off point*" atau juga disebut batas kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, suatu keluarga yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan, tentunya tidak

dapat memenuhi semua kebutuhan dasar minimum, sehingga bisa dikatakan belum sejahtera secara material.

Pada kenyataan dilapangan sering dijumpai bahwa pengukuran kesejahteraan secara material kurang mencerminkan kondisi kesejahteraan suatu keluarga yang sebenarnya. Suatu keluarga pedesaan walaupun berpendapatan dibawah garis kemiskinan, mungkin lebih sejahtera dari pada pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu pengukuran kesejahteraan non-materi (spiritual) dibutuhkan untuk melengkapi pengukuran kesejahteraan secara material. Dengan menggunakan dua dimensi kesejahteraan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesejahteraan suatu keluarga.

Kesejahteraan spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik antaranya: ketaqwaan, keselarasan, daya juang dan aspek non fisik lainnya. Suatu keluarga, walau dibawah garis kemiskinan, mungkin lebih sejahtera karena mereka lebih merasa bersyukur atas kurnia-Nya, karena keinginanya sudah terpenuhi, karena merasa telah hidup selaras dengan alam dan alasan lainnya. Akan tetapi sebaliknya, suatu keluarga merasa kurang sejahtera walau sudah berpendapatan diatas garis kemiskinan, karena masih ada saja keinginan yang belum terpenuhi, karena merasa selalu ketakutan dan tertekan, karena merasa stres dan dituntut oleh pekerjaan dan alasan lainnya. Kesejahteraan spiritual sulit diukur mengingat lebih bersifat subjektif. Akan tetapi tidak berarti bahwa ukuran kesejahteraan spiritual ini kemudian disisihkan dalam mencirikan semua keluarga sejahtera.

2.1.8.1 Masyarakat dikatakan Sejahtera apabila sudah memenuhi Keteria sebagai berikut :

- a) Telah terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, papan, dan pangan.
- b) Memiliki usia produktif relative lebih tinggi.

- c) Telah terjaminnya kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
- d) Tidak memiliki angka pengangguran baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.
- e) Rendahnya tingkat kriminalisme yang berstatus penghasilan dibawah rata-rata.
- f) Tingkat sekebahagiaan masyarakat mayoritas lebih tinggi.
- g) Adanya jaminan sosial bagi masyarakat lansia.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Penelitian yang di lakukan oleh Suherman, Nurhapsa, Irmayani **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DI DESA BATU MILA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI LIMBAH PERTANIAN** (Studi kasus Desa Batu Mila yang terletak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang) “memanfaatkan limbah pertanian menjadi pupuk organik demi menekan pupuk anorganik. Proses pembuatan pupuk dikhususkan adalah limbah perternakan (feses kambing), karena cukup tersedia. Hasil pelatihan diperoleh pupuk sudah jadi yang difermentasi selama satu bulan. Untuk mengoptimalkan hasil dari pelatihan, diharapkan peserta yang telah berhasil dapat membantu dalam penyebaran pengetahuan dan pengalaman agar semua peserta berhasil mengelola limbah yang ada.”

2.2.2 Penelitian yang di lakukan oleh Oktavia Rahayu Puspitarini yang berjudul **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI TEKNOLOGI PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK** (Studi kasus Desa Kidal Kecamatan Tumpang, Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.) “masyarakat desa memahami adanya potensi olahan limbah menjadi produk pupuk organik. Dengan adanya inovasi tersebut membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi dampak limbah peternakan serta mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia di Desa Kidal

Kecamatan Tumpang, Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.”

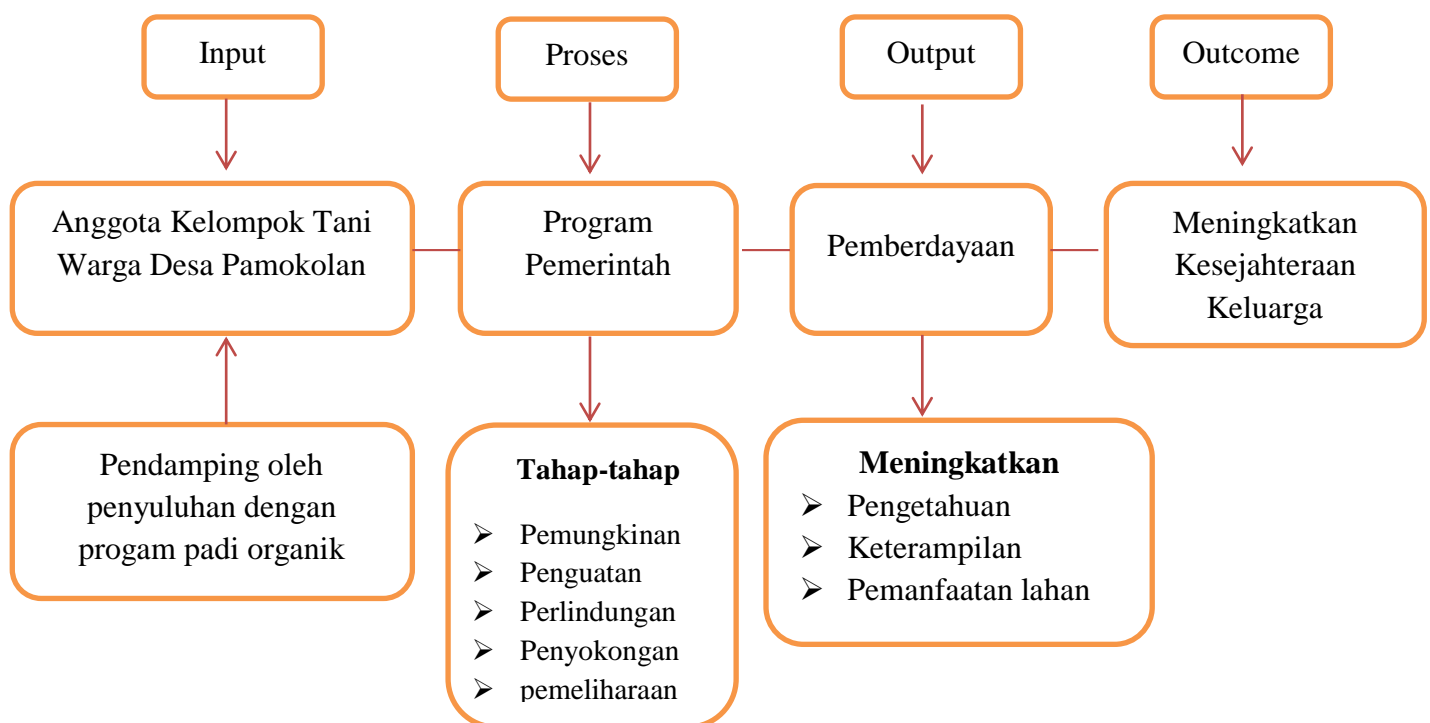
2.2.3 Penelitian yang di lakukan oleh Setiono, fikriman dalam judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan dan Pengelolaan Pupuk Organik Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Di Desa Tanah Periuk (studi kasus Di Desa Tanah Periuk) “ masyarakat desa tanah periuk mengenai proses pembuatan pupuk kompos, pupuk cair organik dari urine ternak dan mikroorganisme local (MOL) dengan pembuatan beberapa metode pembuatan pupuk organik kompos dengan cara pembuatan pupuk kompos berlapis, kompos dengan cara dicampur, penggunaan bokhasi. Pembuatan pupuk organik cair melalui fermentasi urine ternak. Pembuatan dengan mikroorganisme local (MOL) dari berbagai bahan organik (buah-buahan, rebung bambu, bonggol pisan. Supaya masyarakat bisa mengikuti cara pembuatan pupuk organik dengan bisa sendiri dengan bahan yang tersedia.

2.2.4 Penelitian yang di lakukan oleh Afnan Anshori dalam judul **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DARI SABUT KELAPA OLEH KELOMPOK TANI DI DESA GAYAM KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK** Skripsi ini berfokus pada pengorganisasian masyarakat melalui pengolahan sabut kelapa menjadi pupuk organik, pemberdayaannya dilakukan melalui pelatihan pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa sebagai upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan mereka, mulai pertemuan untuk belajar bersama mengetahui dari kegunaan potensi yang mereka punyai untuk keberlangsungan pertanian mereka.

2.2.5 Penelitian yang di lakukan oleh Heri Wijayanto, Didik Riyanto, Bambang Triyono, Hakas Putri Wikan Estu dalam judul “Pemberdayaan Kelompok

Tani Desa Jatimalang, Kabupaten Pacitan melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik”, mempunyai potensi dalam produksi pupuk organik hal ini karena didukung oleh sisa hasil pertanian (jerami, batang pohon jagung, batang kedelai, dan lain-lain), dan limbah peternakan (kotoran hewan) yang melimpah. Pemanfaatan limbah pertanian maupun peternakan masih belum maksimal. Pengolahan limbah pertanian dan peternakan menjadi kompos yang dilakukan oleh sebagian besar petani di Desa Jatimalang belum menggunakan proses fermentasi, sehingga hasilnya dan kualitasnya kurang maksimal.

2.3 Kerangka Konseptual



Pada **Gambar 2.1**

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator terpenting untuk melihat keberhasilan suatu daerah tersebut, setiap daerah akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara

optimal. Kondisi dinegara berkembang untuk pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan muncul permasalahan dalam meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Bagi masyarakat Pamokolan, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan ataupun kurang mutunya potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sudah sejak lama menjadi persoalan pemerintahan desa dan daerah Pemerintah Provinsi Jabar, hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Faktor tersebut banyak dipengaruhi dengan geografis, budaya dan nasib ekonomi keluarga serta lingkungan yang kurang produktif. Kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan pelayanan publik yang tidak memadai.

Upaya untuk mengurangi dan pengentas kemiskinan masyarakat perlu adanya pemberdayaan masyarakat produktif, inovatif dan merancang sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui program untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan data. Untuk menumbuhkan ekonomi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pembentukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor partisipasi, perlindungan, iklim yang kondusif dari pemerintah daerah, lingkungan kondusif dan kebijakan perluasan kesempatan kerja serta memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi. Teori andragogi, pengadaan program pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi dan perubahan menggunakan konsep diri yang positif yaitu kepercayaan diri bahwa dirinya berkeinginan dan mampu melakukan perubahan.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dikemukakan diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Upaya apa yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pupuk organik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis.